



Dukung Pemkot, Massa Teriaki Perwakilan PPM

Sambungan dari hal t

Dan peraturan perundang-undangan. "Setelah ini masih dua kali sidang lagi untuk putusan," ungkap Kuasa Hukum Pemkot Jogja Rahmat S. Sokonagoro usai sidang.

Dalam persidangan kemarin Ketua Majelis Hakim Dessy Wudiantari memutuskan sidang lanjutan digelar besok (24/1). Dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Rahmat mengaku telah menyiapkan sejumlah saksi dari berbagai unsur. Hanya, dia enggan membeberkan siapa saja saksi yang akan diajukan ke persidangan. "Tidak bisa kami disebutkan. Agar tidak mengurangi efek kejutannya," dalihnya.

Sebagaimana diketahui, sidang tersebut bermula adanya permohonan oleh PPM. PPM menuding Pemkot tak bisa menjalankan amanat Perda Kota Jogja Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Serta Peraturan Wali Kota Jogja Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro.

Sidang kemarin dihadiri ratusan orang yang mengatasnamakan gabungan komunitas pedagang kaki lima Malioboro. Sempat terjadi keriuhan selama persidangan. Karena sebagian besar pengunjung tak kebagian tempat di ruang sidang. Namun mereka berusaha masuk ruangan untuk mengikuti jalannya persidangan. Bahkan hakim beberapa kali memperingatkan pengunjung sidang untuk tenang.

Ruang sidang kembali riuh se-

saat setelah hakim mengetok palu. Pengunjung sidang serempak meneriaki perwakilan PPM. Beberapa polisi tampak turut mengamankan keadaan di dalam dan luar gedung pengadilan.

Ketua Lembaga Pemberdayaan Komunitas Kawasan Malioboro Rudi Harto mengungkapkan, kedatangan para PKL hanya sebagai bentuk dukungan kepada termohon, dalam hal ini pemerintah. Sebab, tuntutan pemohon dapat berdampak pada PKL. Soal teriakan PKL kepada pemohon, Rudi menyebutnya sebagai aksi spontanitas.

"Mengingat dalam kasus ini subjek yang terdampak adalah para PKL. Kami memberikan dukungan moral kepada pemerintah," ungkapnya.

Rudi keberatan dengan tuntutan PPM, yang menurutnya hanya bertujuan menyingkirkan PKL di kawasan Malioboro. Sementara kehadiran PKL dinilai sebagai ikon Malioboro. Sekaligus pemikat wisatawan untuk datang ke Jogja.

Rudi mengklaim selama ini pemerintah telah mendukung kehadiran PKL di kawasan wisata itu. Sedangkan para pemohon menuntut Pemkot hanya atas kepentingan pribadi. "Intinya kami siap ditata tapi tidak mau digusur," ujarnya.

Rudi berharap perselisihan antara pemerintah dan PKL dengan PPM bisa segera terselesaikan. Agar Malioboro tetap bermanfaat bagi siapa pun. "Marilah kita sama-sama menjaga Malioboro. Sama-sama kita cari makan. Jangan sampai ada satu pihak yang menyingkirkan satu sama lain.

Harapannya budaya di Malioboro tetap dijaga," ucapnya.

Koordinator Aksi PKL Malioboro Edy Susanto mengaku akan membawa massa lebih banyak pada sidang lanjutan besok. Sedikitnya 12 komunitas bergabung untuk mengawal persidangan. Itu sebagai bentuk komitmen komunitas pedagang Malioboro. Untuk memberi dukungan kepada pemerintah. Kendati demikian, Edy berjanji tetap menjaga kondusivitas selama persidangan.

Menurut Edy, gerakan mengawal sidang merupakan inisiatif para pedagang Malioboro. Tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Terpisah, Ketua PPM Budhi Susilo menyatakan, usai persidangan mobilnya digedor-gedor massa. "Ya saya merasa terancam. Saya sebagai pemilik lahan kok digedor orang asing yang menempati lahan saya. Padahal lahan tersebut warisan kakek saya," ungkapnya saat dihubungi *Radar Jogja*.

Pria yang akrab disapa Cuncun ini membenarkan adanya teriakan massa yang ditujukan kepadanya. Dia diteriaki untuk disuruh pergi dari kawasan Malioboro. "Lha nggak terbalik *po?* Yang pergi seharusnya mereka karena tidak punya hak atas tanah," tegasnya.

Kapolsek Banguntapan Suhadi mengaku telah mengerahkan sedikitnya 25 personel bersenjata untuk berjaga selama persidangan. Dia berjanji akan terus menjaga proses persidangan hingga selesai. "Saya apresiasi massa karena tertib dan mau membersihkan sampah mereka sendiri," ujarnya. (cr5/yog/rg)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum 2. UPT. Malioboro 3. Dinas PUPKP 4. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005